

KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK BUMG DI GAMPONG BANDAR BARU KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

M.Rizal Fazri.AR, Khairu Syukrillah,Hadiansyah

Program Studi ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Iskandar Muda,
Banda Aceh, Indonesia

Email : m.rizalfajri6@gmail.com

Abstract

Communication of the Village Head in forming a Village BUM to create community prosperity in Gampong Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City. The improvement of community welfare in the gampong needs to be supported by community participation which involves the participation of the younger generation because only with community support can efforts to improve community welfare run more effectively. The research uses qualitative methods with the main data collection tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the village head's communication pattern in efforts to establish a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Gampong Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City regarding budget provision is seen by the Bandar Baru village head, Kuta Alam District, Banda Aceh City still not providing sufficient budget for formed BUMG. The community of Bandar Baru gampong, Kuta Alam District, Banda Aceh City, gave an unfavorable response to the formation of BUMG. The management's attitude of being too apathetic in running the business has caused BUMG gampong Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City to not develop in accordance with the expectations of the village head and his apparatus. Barriers to village head communication in efforts to form a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Gampong Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City. From the aspect of budget availability, it can be seen that the village head of Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City still has not provided sufficient budget to form a BUMG. . The community of Bandar Baru gampong, Kuta Alam District, Banda Aceh City, gave an unfavorable response to the formation of BUMG. The management's attitude of being too apathetic in running the business has caused BUMG gampong Bandar Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City to not develop in accordance with the expectations of the village head and his apparatus.

Keywords: Village Head Communication, BUMG

ABSTRAK

Komunikasi Kepala Desa dalam membentuk BUM Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kesejahteraan masyarakat ditingkatkan *gampong* perlu didukung oleh adanya peran serta masyarakat yang melibatkan peran serta generasi muda karena hanya dengan dukungan masyarakat itulah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data utama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi kepala desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terkait penyediaan anggaran terlihat kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum menyediakan anggaran yang mencukupi untuk membentuk BUMG. Respon yang tidak baik diberikan masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap pembentukan BUMG. Sikap pengurus yang terlalu apatis dalam menjalankan usaha telah menyebabkan BUMG *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak berkembang sesuai dengan harapan kepala desa dan perangkatnya. Hambatan komunikasi kepala desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dari aspek ketersediaan anggaran terlihat bahwa kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum menyediakan anggaran yang mencukupi untuk membentuk BUMG. Respon yang tidak baik diberikan masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap pembentukan BUMG. Sikap pengurus yang terlalu apatis dalam menjalankan usaha telah menyebabkan BUMG *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak berkembang sesuai dengan harapan kepala desa dan perangkatnya.

Kata Kunci : Komunikasi Kepala Desa, BUMG

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan system pemerintahan level terendah, sehingga dalam era otonomi daerah memiliki kedudukan serta peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat di perdesaan. Akan tetapi, faktanya terlihat jelas bahwa pemerintah desa lebih banyak menangani persoalan yang berkaitan dengan administrasi, walaupun fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kurang berjalan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah sendiri terkesan apatis dalam melihat pemerintah desa. Namun demikian, pemerintah tetap mendorong kedudukan pemerintah desa lebih kuat, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan, perannya seringkali dipinggirkan. Di sisi lain, cukup banyak program pemberdayaan yang dikelola kementerian atau lembaga yang berpengaruh langsung kepada masyarakat melalui skema BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Biasanya pemerintah desa akan dilibatkan ketika ada ditemukan masalah. Kondisi ini sering dikeluhkan oleh aparat desa. Oleh karena itu, berbagai pihak di tingkat pusat masih belum rela melimpahkan wewenang kepada pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kondisi tersebut sering dijadikan alasan untuk memperkuat desa dan pemerintah desa. Akan tetapi, perlu diupayakan langkah strategis untuk diterapkan antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Salah satu program yang sedang dipromosikan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), walaupun setelah diterbitkannya UU Desa penamaan BUMDes berubah menjadi BUM Desa, sesuai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam bab X diatur juga mengenai BUM Desa. Bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa. BUM Desa harus dikelola dengan mengedepankan konsep kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa harus menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum serta memiliki kesempatan untuk mengelola aset desa yang lebih luas seperti pengelolaan pasar, kawasan pariwisata, air bersih, dan listrik perdesaan.

Badan usaha ini termasuk lembaga ekonomi yang perlu dibentuk landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya peranan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat disiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Namun, pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa.

Melalui pembentukan adanya BUM Desa diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai penggerak perekonomian desa. BUM Desa didirikan dengan kesepakatan melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk memperkuat perekonomian desa, BUM Desa juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan

masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta mengelola potensi desa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan usahanya diterapkan prinsip efisiensi dan efektifitas. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Jika kelembagaan ekonomi kuat serta ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan pendirian BUM Desa tersebut, maka kepala desa membutuhkan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Menurut Mufid (2012: 2) Komunikasi merupakan cara penyampaian pesan yang dilakukan oleh setiap orang untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi kita tidak bisa berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain, proses komunikasi dalam hal ini bisa melalui menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan, ucapan, tulisan, gerak tubuh dan penyiaran.. Oleh karena itu, kunci utama dalam berkomunikasi adalah bahasa yang paling utama, kemudian sikap dan situasi waktu berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu transaksi untuk meningkatkan kerja dan mengoptimalkan keinginan dalam sebuah lembaga atau instansi. Komunikasi dalam penerapannya terdapat berbagai macam bentuk dan strateginya salah satunya yaitu komunikasi kepala desa dalam mendirikan BUM Desa.

Komunikasi merupakan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam sebuah organisasi untuk mempengaruhi orang banyak, tujuannya untuk mendapatkan hal-hal yang diharapkan. Karena komunikasi bukan hanya dikalangan masyarakat saja tetapi juga dibutuhkan oleh lembaga-lembaga, baik itu lembaga swasta maupun pemerintahan. Berhasilnya komunikasi Kepala Desa Simpang Heran, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kerja kerasnya di kalangan masyarakat dan juga tidak terlepas dari adanya dukungan serta partisipasi masyarakat, sehingga komunikasi yang digunakan oleh kepala desa tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sebaliknya jika tidak ada peran serta ikut berpartisipasi masyarakat maka, pemimpin tersebut hanyalah sia-sia dalam menjalankan tugasnya.

Komunikasi Kepala Desa dalam membentuk BUM Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. kesejahteraan masyarakat di tingkatkan *gampong* perlu didukung oleh adanya peran serta masyarakat yang melibatkan peran serta generasi muda karena hanya dengan dukungan masyarakat itulah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Komunikasi Kepala Desa dalam Membentuk BUMG di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi yang secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran.. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan *interview* (wawancara) dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2014: 280-281), menyebutkan bahwa “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

PEMBAHASAN

1. Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

a. Komunikasi dengan Perangkat *Gampong*

Kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum melaksanakan komunikasi secara optimal dengan perangkat desa, sehingga tidak ada kesepakatan dalam pembentukan BUMG. Padahal, salah satu aturan yang semestinya dalam pembentukan BUMG adanya kesepakatan Bersama antara kepala desa dengan perangkat. Hal ini yang menyebabkan pembentukan BUMG di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sesuai dengan harapan yang pada akhirnya menyebabkan Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat dengan sendirinya.

Oleh karena itu, dalam pembentukan BUMG di *gampong* Bandar Baru perlu dibangun komunikasi secara efektif. Dalam hal ini, Widjaja, (2010: 15) mengemukakan bahwa “komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian

dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak dapat memahaminya”.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa komunikasi yang dilaksanakan oleh kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sudah tergolong berjalan cukup efektif. Efektivitas komunikasi yang dibangun oleh kepala desa tersebut dapat dilihat dari semua audiens mampu memahami informasi yang disampaikan oleh kepala desa, terutama informasi yang berkaitan dengan pembentukan BUMG di *gampong* tersebut.

b. Mengadakan Rapat dengan Warga Masyarakat

Masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh kepala desa. Padahal, kepala desa telah berupaya secara maksimal agar pembentukan BUMG di *gampong* tersebut dapat berjalan dengan upaya. Seharusnya masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian rapat yang dilaksanakan oleh kepala desa agar mereka memberi pikirannya, sehingga pembentukan BUMG dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat di *gampong* tersebut, terutama dalam rangka meningkatkan anggaran pendapatan *gampong* agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dengan optimal.

Akan tetapi, mengadakan rapat dengan warga masyarakat merupakan upaya untuk mengambil keputusan dengan cara meminta pendapat kepada orang banyak. Dalam hal ini, Yuwono (2010: 61) menjelaskan bahwa “musyawarah biasanya terjadi sebelum diambil suatu keputusan yang memerlukan keterangan dari bermacam-macam satuan organisasi. Musyawarah dilakukan dengan jalan meminta pendapat kepada pejabat lain yang dianggap perlu untuk memberikan pendapat atau keputusan yang diambil”.

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dalam membentuk BUMG di *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Di sisi lain, melaksanakan rapat juga bertujuan untuk meminta pendapat masyarakat yang terkait dengan pembentukan badan usaha yang didirikan oleh kepala desa di *gampong* tersebut.

c. Koordinasi dalam Pelaksanaan

Koordinasi yang dilaksanakan kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara maksimal. Padahal, dalam melaksanakan sebuah kegiatan perlu dilakukan koordinasi dengan optimal, sehingga

program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan upaya. Di sisi lain, belum optimalnya koordinasi dapat dilihat dari masih ada Sebagian perangkat desa dan masyarakat desa yang tidak mengetahui akan terbentuknya badan usaha milik *gampong* tersebut. Padahal, secara prosedur pembentukan badan usaha tersebut membutuhkan koordinasi yang optimal dari kepala desa dengan jajarannya.

Namun demikian, koordinasi dalam pembentukan BUMG di *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh termasuk salah satu bentuk komunikasi vertikal yang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai usaha untuk memberi petunjuk dan perintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2011: 124) mengatakan bahwa “komunikasi vertikal pimpinan memberikan perintah (instruksi), petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, larangan-larangan dan bahkan berupa pemberian hukuman atau sanksi. Sedangkan bawahan memberikan laporan, pendapat, saran, gagasan (ide), kreativitas, inisiatif kepada pimpinan”.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilakukan dalam rangka membentuk BUMG di *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bertujuan untuk memberi perintah, petunjuk serta penjelasan terkait dengan pembentukan badan usaha tersebut. Dan pembentukan badan usaha tersebut merupakan ide gagasan dan ide kreatif yang dituangkan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di *gampong* yang dipimpinnya.

2. Hambatan Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
 - a. Ketersediaan Anggaran *Gampong*

Kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum menyediakan anggaran yang mencukupi untuk membentuk BUMG. Padahal, dalam menjalankan usahanya BUMG membutuhkan modal usaha yang cukup besar. Dan modal usaha tersebut dapat diperoleh melalui anggaran yang disediakan oleh pemerintah *gampong* melalui musyawarah perencanaan pembangunan *gampong* yang diadakan setiap tahunnya. Akan tetapi, anggaran yang disediakan oleh kepala desa tersebut masih belum mampu menjalankan usaha BUMG di *gampong* tersebut. Oleh karena itu, penyediaan anggaran yang mencukupi akan penting dalam melaksanakan pembentukan BUMG tersebut.

Akan tetapi, hambatan yang disebabkan oleh kurang tersedianya anggaran dalam pembentukan BUMG dapat diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi

agar anggaran dapat disediakan secara optimal. Menurut Darsowiryo (2009: 13) mendefinisikan “komunikasi sebagai proses penggunaan bersama lambang-lambang yang bermakna mengandung arti oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menciptakan saling pengertian demi tercapainya suatu tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyediaan anggaran pembentukan BUMG secara memadai dapat ditempuh melalui jalur komunikasi yang efektif. Hal ini perlu dilakukan karena komunikasi bertujuan untuk menciptakan saling pengertian demi tercapainya suatu tujuan tertentu, sehingga penyediaan anggaran yang digunakan untuk pembentukan badan usaha akan berhasil dengan maksimal.

b. Respon Masyarakat

Respon yang tidak baik diberikan masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap pembentukan BUMG. Respon negative tersebut diberikan oleh masyarakat *gampong* tersebut disebabkan mereka tidak mengetahui manfaat dari pembentukan badan usaha tersebut. Di sisi lain, masih ada sebagian warga masyarakat yang menyindir perangkat desa kalau pembentukan badan usaha tersebut memiliki tujuan untuk keuntungan dari perangkat desa tersebut. Padahal, keberadaan BUMG akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di *gampong* tersebut, terutama untuk melaksanakan pembangunan secara lebih merata.

Namun demikian, hambatan dalam pembentukan BUMG yang disebabkan oleh respon masyarakat yang tidak baik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih maksimal. Menurut Effendy (2008: 7) menjelaskan bahwa “komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, komunikasi akan berhasil jika adanya pengertian serta kedua belah pihak saling memahaminya. Dimana komunikasi tersebut sangat penting sama halnya dengan bernafas. Kualitas komunikasi menentukan keharmonisan hubungan dengan sesama individu”.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa komunikasi yang dibangun oleh kepala desa akan mampu memperbaiki respon masyarakat terhadap pembentukan BUMG di *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Apalagi komunikasi merupakan salah satu cara untuk merubah sikap dan respon seseorang untuk bertindak dan bersikap menilai terhadap sesuatu hal, terutama untuk memperbaiki masyarakat dalam pembentukan badan usaha tersebut. Di sisi lain, komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup/ lingkungan

organisasi/perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja semesti dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dari masyarakat secara keseluruhan.

c. Sikap Pengurus

Sikap pengurus yang terlalu apatis dalam menjalankan usaha telah menyebabkan BUMG *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak berkembang sesuai dengan harapan kepala desa dan perangkatnya. Padahal, tujuan awal dari poembentukan badan usaha tersebut untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun akibat ulah pengurusnya yang sering bersikap apatis, maka badan usaha tidak berjalan sesuai dengan rencana pembentukannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di *gampong* tersebut juga tidak berjalan dengan optimal.

Di samping itu pula, sikap pengurus dalam menjalankan roda organisasi masih belum optimal, sehingga masyarakat belum mampu mencapai tujuannya. Menurut Gybson dalam Muhyadi (2009: 5) yaitu “kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai berbagai tujuan yang tidak dapat dicapai hanya dengan kegiatan satu organisasi secara sendiri”.

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum mampu mencapai tujuan melalui organisasi BUMG yang mereka bentuk bersama. Tidak tercapainya tujuan organisasi tersebut disebabkan oleh adanya sikap apatis pengurus organisasi dalam menjalankan usaha yang dikembangkan melalui BUMG tersebut. Oleh karena itu, komunikasi itu adalah persamaan pendapat dan untuk kepentingan itu maka orang harus mempengaruhi orang lain dahulu sebelum orang lain itu berpendapat, bersikap, bertindak laku yang sama dengan kita.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola komunikasi kepala desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terkait penyediaan anggaran terlihat kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum menyediakan anggaran yang mencukupi untuk membentuk BUMG. Respon yang tidak baik diberikan masyarakat *gampong* Bandar Baru

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap pembentukan BUMG. Sikap pengurus yang terlalu apatis dalam menjalankan usaha telah menyebabkan BUMG *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak berkembang sesuai dengan harapan kepala desa dan perangkatnya.

2. Hambatan komunikasi kepala desa dalam upaya pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di *Gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dari aspek ketersediaan anggaran terlihat bahwa kepala desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum menyediakan anggaran yang mencukupi untuk membentuk BUMG. Respon yang tidak baik diberikan masyarakat *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terhadap pembentukan BUMG. Sikap pengurus yang terlalu apatis dalam menjalankan usaha telah menyebabkan BUMG *gampong* Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak berkembang sesuai dengan harapan kepala desa dan perangkatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Manajemen Penelitian*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darsowiryo, Soekadi. (2009). *Peranan Komunikasi Dalam Organisasi*. Surakarta: Bumi Ketingan Surakarta.
- Handoko T. (2010). *Manajemen*. Yogyakarta: PPFY Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung,: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhyadi (2009). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nitisemito, Alex. (2012). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Veithzal (2010). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Widjaja (2010). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta : Bumi Aksara.